

Keputusan Inggris Menetapkan Kepulauan Chagos sebagai *Marine Protected Area* (MPA)

Ni Nyoman Ary Trisna¹⁾, D.A. Wiwik Dharmiasih²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: arytrisna@student.unud.ac.id¹⁾, wiwikd@unud.ac.id²⁾, kawitriresen@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The Chagos Archipelago is one of the British territories in the Indian Ocean and play a role in safeguarding the security interests of Britain in the region. The British government in safeguarding its security interests in the Chagos Islands has designated the archipelago as a no-take Marine Protected Area (MPA). This was done to safeguard the security interests of a joint military bases between Britain and the United States. The military base is located on one of the islands in the Chagos Islands named Diego Garcia. Britain's decision to establish the Chagos Archipelago as a no-take MPA was taken after protests from indigenous people of the Chagos Islands and Mauritius who wanted to return to their territory. This study analyzes the security interests of British in protecting its military bases by implementing environmental policies. The Theoretical Framework used in this study is National Security and Military-Environmentalism.

Keywords: *Marine Protected Area, military base, national security, military environmentalism*

1. PENDAHULUAN

Kepulauan Chagos atau *British Indian Ocean Territory* (BIOT) merupakan salah satu *British Overseas Territories*, wilayah milik Inggris yang terletak di luar negeri. Kepulauan Chagos yang berada di tengah Samudra Hindia dan berbatasan dengan Afrika di sebelah timur, Indonesia di sebelah barat, India di sebelah selatan, dan Kepulauan Mascarene di sebelah timur laut (Gomez, 2014). Pemerintah Inggris menggunakan Kepulauan Chagos sebagai salah satu pangkalan militer miliknya, yaitu di Pulau Diego Garcia. Pangkalan militer tersebut merupakan kerja sama militer antara Inggris dan Amerika Serikat yang ditandatangani di tahun 1966 (Bruce, 1967). Populasi manusia di Kepulauan Chagos terpusat di Diego Garcia yang hanya menampung sekitar 3000 orang

yang bekerja di pangkalan militer (Lunn & Mills, 2013). Pemerintah Inggris mendeportasi Chagossian atau masyarakat asli Kepulauan Chagos ke luar kepulauan di tahun 1965 untuk menyediakan tempat bagi pangkalan militer tersebut (Jeffery, 2013).

Pada tanggal 1 April 2010, Pemerintah Inggris menetapkan Kepulauan Chagos sebagai *Marine Protected Area* (MPA) (Colson & Vohrer, 2015). MPA di Kepulauan Chagos termasuk ke dalam cagar laut *no-take* yang melarang pemancingan komersial (*Marine Protected Area News*, 2010). Satu-satunya zona yang tidak dimasukkan ke dalam MPA adalah area di sekitar Diego Garcia yang berukuran sekitar 470 km² (Sand, 2010). Pengecualian tersebut disebabkan oleh pertimbangan terhadap eksistensi pangkalan militer di Diego Garcia. Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat tidak

ingin implementasi cagar laut di Kepulauan Chagos berdampak pada kapabilitas operasional pangkalan militer di Diego Garcia (FCO, 2009).

Keputusan Pemerintah Inggris untuk menjadikan Kepulauan Chagos sebagai *no-take* MPA menimbulkan permasalahan dengan masyarakat asli Kepulauan Chagos dan Mauritius. Chagossian melihat penetapan *no-take* MPA menghalangi upaya mereka menetap kembali ke Kepulauan Chagos. Sementara itu, *no-take* MPA juga mengganggu kedaulatan dan kepentingan perekonomian Mauritius. Keputusan Pemerintah Inggris untuk tetap menetapkan Kepulauan Chagos sebagai *no-take* MPA menarik perhatian Peneliti. Pemerintah Inggris mengabaikan kepentingan-kepentingan pemangku kepentingan lain di kepulauan tersebut, seperti Chagossian dan Mauritius.

2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan tiga literatur sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini. Kajian pustaka pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Michael C. Desch (1992) berjudul *Bases for the Future: US Military Interest in the Post-Cold War Third World*. Jurnal ini menjelaskan mengenai kepentingan Amerika Serikat membangun pangkalan militer di negara-negara Dunia Ketiga pasca Perang Dingin. Desch (1992) menjelaskan pangkalan militer di negara-negara Dunia Ketiga memiliki nilai strategis untuk meningkatkan efektivitas misi militer Amerika Serikat. Desch (1992) juga menggunakan pendapat Nicholas Spykman

mengenai pangkalan militer yang berfungsi sebagai pengganda kekuatan (*force multipliers*). Spykman menulis bahwa pengaruh kekuatan berbanding terbalik dengan jarak dari sumbernya, sehingga kekuatan militer suatu negara akan lebih besar bila jaraknya dengan pangkalan militer lebih pendek, begitu juga sebaliknya

Kajian pustaka kedua digunakan untuk melengkapi kajian pustaka pertama. Kajian pustaka kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Najah M. Adam (2017) berjudul *Berbera Basing Politics: Understanding Actors, Interests, and Animosities*. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai aktor dan kepentingan dalam rencana pembangunan pangkalan militer Berbera di Somaliland oleh Uni Emirat Arab (UEA). Pembangunan pangkalan militer di luar negeri merupakan praktek yang sering dilakukan oleh negara-negara *superpower*. Namun, penelitian Adam (2017) menyoroti praktek tersebut saat dilakukan oleh negara yang lebih kecil di wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi.

Kajian pustaka pertama dan kedua membantu penulis mengetahui bahwa negara mengutamakan kepentingan keamanan dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri, terutama terkait pangkalan militer. Meskipun lingkungan politik internasional telah berubah, pangkalan militer tetap menjadi komponen yang penting dalam menjaga kepentingan suatu negara. Namun, kedua jurnal tersebut belum membahas mengenai kebijakan negara dalam mempertahankan kontrolnya terhadap suatu wilayah yang strategis untuk kepentingannya.

Oleh karena itu, Peneliti menggunakan kajian pustaka ketiga.

Kajian pustaka ketiga adalah salah satu bab dalam buku *An Environmental History of the UK Defense Estate 1945 to the Present* yang ditulis oleh Marianna Dudley pada tahun 2012. Bab ketiga dari buku tersebut berjudul *Castlemartin*. Bab ini menjelaskan mengenai area latihan militer di Castlemartin dan taman nasional yang mengelilinginya. Dudley (2012) dalam Bab *Castlemartin* menjelaskan strategi pemerintah menggunakan isu lingkungan untuk mempertahankan kepentingannya di Castlemartin. Buku ini menggunakan konsep *military-environmentalism* untuk menjelaskan strategi pemerintah saat melindungi kepentingannya di kawasan militer dengan memanfaatkan nilai lingkungan.

Dudley (2012) menunjukkan keuntungan yang dapat diperoleh dalam hubungan lingkungan dan militer dari sudut pandang para pembuat kebijakan. Dudley (2012) menjelaskan strategi pemerintah dalam memanfaatkan hubungan militer dan lingkungan untuk kepentingan militernya. Bab *Castlemartin* dalam buku yang ditulis Dudley (2012) membantu Peneliti melihat kebijakan pemerintah untuk mempertahankan *status quo* di area pangkalan militer. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa Inggris sudah pernah menggunakan isu lingkungan dan konservasi untuk mempertahankan kontrolnya terhadap suatu wilayah yang vital bagi kepentingan militer.

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir Keamanan Nasional dan *Military-*

Environmentalism. Berdasarkan ketiga kajian pustaka tersebut, penelitian ini mengkaji bahwa Keamanan Nasional dan *Military-Environmentalism* dapat digunakan dalam menjabarkan kepentingan keamanan Inggris menetapkan Kepulauan Chagos sebagai MPA.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, situs resmi negara dan laporan dari organisasi-organisasi terkait. Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hipotesis kerja penelitian ini adalah Inggris menetapkan *no-take* MPA untuk menghalangi Chagossian kembali dan menetap secara permanen di Kepulauan Chagos. Kembalinya Chagossian ke Kepulauan Chagos akan menurunkan efektivitas pangkalan militer dan kontrol Inggris di Diego Garcia sehingga mengganggu kepentingan keamanan Inggris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diego Garcia merupakan pulau karang di Kepulauan Chagos yang termasuk dalam BIOT (*British Indian Ocean Territory*). BIOT awalnya terdiri dari Pulau Desroches, Aldabra, Farquhar dan Kepulauan Chagos. Kepulauan Aldabra, Desroches, dan Farquhar merupakan bagian dari Seychelles, sementara Kepulauan Chagos merupakan bagian dari Mauritius (Durup, 2013). Pulau-pulau tersebut dipisahkan

dari Seychelles dan Mauritius yang merupakan bekas wilayah koloni Inggris (Bangaroo, 2005). Pemisahan itu bertujuan untuk menciptakan wilayah koloni baru yang bisa menyediakan tempat bagi pembangunan pangkalan militer di Samudra Hindia demi kepentingan Inggris dan Amerika Serikat (Bezboruah, 1977; Bandjunis, 2001; Palmer, 1992)

Pulau Desroches, Aldabra, Farquhar dan Kepulauan Chagos menjadi BIOT berdasarkan *British Indian Ocean Territory Order* tahun 1965 (Agnew, 1965). Pemerintah Inggris mengembalikan Aldabra, Desroches, dan Farquhar kembali ke Republik Seychelles di tahun 1976. Pemerintah Inggris memindahkan Chagossian yang masih tersisa di Kepulauan Chagos saat pangkalan militer di Diego Garcia mulai dibangun di tahun 1971. Sementara itu, sisa masyarakat di Kepulauan Chagos yang tinggal di Peros Banhos dan Salomon direkolasi di tahun 1973 (Gifford & Dunne, 2014). Chagossian dipindahkan dari Kepulauan Chagos ke Mauritius dan Seychelles (Vine, 2009).

Inggris dan Amerika Serikat mengosongkan Diego Garcia dari Chagossian untuk kepentingannya di Diego Garcia. Pangkalan militer yang terletak di luar negeri memiliki kerentanan terhadap opini publik dari negara tempat pangkalan tersebut dibangun. Wilayah yang memiliki sedikit atau tanpa penduduk secara relatif aman dari protes mengenai keberadaan pangkalan militer asing. Para pembuat strategi Angkatan Laut menyarankan pembangunan pangkalan dilakukan di wilayah yang strategis dan tidak

padat penduduk (Erickson *et al.*, 2010). Inggris lebih mengutamakan kepentingan keamanannya terkait pangkalan militer dengan mengosongkan kepulauan tersebut dari populasi Chagossian.

Pengusiran yang dilakukan oleh Pemerintah Inggris diprotes oleh Chagossian dengan melakukan tuntutan melalui pengadilan Inggris. Namun, *Orders in Council* 2004 menghalangi Chagossian tinggal di Kepulauan Chagos dan menjamin kontrol penuh Pemerintah Inggris terhadap imigrasi di wilayah BIOT. Bab 9 BIOT (*Constitution*) Order 2004 dikutip dalam Galloway (2004) menyatakan bahwa:

“(1) Whereas the territory was constituted and is set aside to be available for the defence purposes of the government of the United Kingdom and the government of the United States of America, no person has the right of abode in the territory.

(2) Accordingly, no person is entitled to enter or be present in the territory except as authorised by or under this order or any other law for the time being in force in the territory.”

Keputusan tersebut tidak menurunkan ambisi Chagossian untuk kembali memperoleh hak tinggal mereka di Kepulauan Chagos. Chagossian menuntut Pemerintah Inggris melalui Pengadilan HAM Eropa setelah kehabisan proses hukum dalam pengadilan Inggris. Aplikasi kasus dari Chagossian pertama kali diajukan pada tanggal 20 September 2004. Proses di Pengadilan HAM Eropa tertunda sementara karena Chagossian harus menyelesaikan masalahnya di pengadilan

domestik Inggris. Namun, setelah keputusan *Law Lords* 2008 yang menunjukkan tidak berubahnya posisi Pemerintah Inggris terkait pemukiman kembali Chagossian, Chagossian memutuskan untuk membawa kasusnya kembali ke Pengadilan HAM Eropa di tahun 2009. Isi tuntutan Chagossian berupa proses pembuatan keputusan yang berujung pemindahan Chagossian dari Kepulauan Chagos, tindakan depopulasi dan cara Chagossian dipindahkan, kondisi penerimaan Chagossian di Mauritius dan Seychelles, pelarangan kembalinya Chagossian, penolakan memfasilitasi pengembalian ketika larangan tersebut dideklarasikan tidak sesuai hukum, serta penolakan memberikan kompensasi (ECHR, 2012).

Pada 1 April 2010, Komisioner BIOT mendeklarasikan penetapan MPA di Kepulauan Chagos melalui Proklamasi BIOT No. 1 tahun 2010. Wilayah yang dimasukkan ke dalam MPA adalah pulau-pulau di Kepulauan Chagos. Batas definitif MPA di Kepulauan Chagos masih belum diklarifikasi, selain Diego Garcia dan tiga mil perairannya tidak termasuk dalam MPA (Sand, 2010).

No-take MPA digunakan sebagai rencana cadangan dalam menghalangi pemukiman kembali Chagossian di Kepulauan Chagos. Seperti yang telah dijabarkan di Sub Bab IV.1.1., Chagossian membawa kasusnya ke Pengadilan HAM Eropa. Pengadilan HAM Eropa akan mengikat Inggris agar menyesuaikan kebijakannya dengan hasil keputusan pengadilan (ECHR, 2014). *No-take* MPA digunakan sebagai penghalang alternatif

apabila keputusan Pengadilan HAM Eropa tidak sesuai dengan kepentingan Inggris. Penetapan *no-take* MPA akan mengacaukan solusi Chagossian untuk bertahan hidup secara permanen di Kepulauan Chagos.

Zona *no-take* MPA di sekitar karang akan menghalangi Chagossian memanfaatkan sumber daya laut untuk pemasukan ekonominya. *No-take* MPA melarang ekstraksi sumber daya laut, termasuk dalam bidang penangkapan ikan. Segala jenis pemancingan di Kepulauan Chagos membutuhkan lisensi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris (Mees *et al.*, 2009a). Namun, seluruh lisensi pemancingan dihentikan di tahun 2010 untuk mengakomodasi *no-take* MPA. Meskipun pemancingan rekreasi diperbolehkan di perairan Diego Garcia, akses ke wilayah tersebut hanya terbatas untuk orang-orang yang memiliki ijin dari angkatan laut.

No-take MPA menghalangi pemenuhan kepentingan Chagossian di Kepulauan Chagos. Chagossian memiliki kepentingan di bidang sumber daya laut Kepulauan Chagos. *No-take* MPA menutup peluang Chagossian memanfaatkan sumber daya fisik perairan tersebut. Pemerintah Inggris terus menekankan argumen bahwa *no-take* MPA secara menyeluruh diperlukan untuk melindungi ekosistem laut Kepulauan Chagos (FCO, 2009), meskipun terdapat alternatif kebijakan berupa pengecualian beberapa pulau yang berpotensi digunakan sebagai tempat tinggal Chagossian. Pemerintah Inggris tidak mempertimbangkan kemungkinan Chagossian kembali ke Kepulauan Chagos dengan memasukkan

seluruh Kepulauan Chagos, kecuali Diego Garcia, ke dalam zona *no-take*.

Alternatif lain Chagossian berupa pemanfaatan ekowisata juga tidak dapat dilakukan karena terbentur kebijakan di kepulauan tersebut. Pemerintah Inggris dalam Archer-Rand (2018) menyatakan bahwa Kepulauan Chagos bukan merupakan destinasi pariwisata. Kapal pesiar yang mengunjungi Peros Banhos atau Solomon di Kepulauan Chagos harus melewati proses pemeriksaan yang ketat. Kapal pesiar diperbolehkan berlabuh hanya untuk tujuan transit dengan batas waktu tertentu, serta memerlukan ijin dari bagian imigrasi BIOT. *Orders in Council* 2004 yang mengontrol secara penuh akses publik akan mempersulit pemanfaatan pariwisata untuk menopang perekonomian Chagossian.

Pemerintah Inggris memiliki alasan saat menghalangi pemukiman kembali Chagossian di Kepulauan Chagos. Kepulauan Chagos merupakan entitas politik yang dibentuk untuk memenuhi kepentingan keamanan Inggris bila dilihat dari peraturan yang mendasarinya, yaitu *Exchange of Notes* 1966. Kepulauan Chagos dibentuk untuk memenuhi kepentingan keamanan Inggris dan Amerika Serikat melalui pangkalan militer gabungan mereka di Diego Garcia. Fasilitas di pangkalan militer Diego Garcia mengalami perkembangan saat situasi geopolitik di wilayah Samudra Hindia mengalami perubahan yang dapat mengancam keamanan Inggris dan aliansinya. Oleh karena itu, periode *War on Terror* berpengaruh negatif pada peluang Chagossian kembali ke

kepulauan tersebut karena nilai strategis Diego Garcia semakin meningkat.

Pemukiman kembali Chagossian di Kepulauan Chagos akan mengancam keleluasaan operasi militer di Diego Garcia. Kepulauan Chagos yang tertutup untuk publik membuat hal yang terjadi di Diego Garcia tidak akan diketahui oleh orang-orang luar karena tidak adanya akses bagi jurnalis. Tertutupnya akses jurnalis membuat pemerintah bisa mengatur arah dan konten informasi yang berkaitan dengan Diego Garcia. Kepulauan Chagos yang tidak memiliki penghuni tetap dan tertutup untuk publik membuat apapun yang terjadi di pulau tersebut hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Kondisi tersebut menjamin kerahasiaan dan keterasingan pangkalan militer Diego Garcia sehingga ideal untuk keamanan dan efektivitas operasional pangkalan militer di Diego Garcia.

Pangkalan militer memiliki hubungan dengan kapabilitas negara saat menghadapi ancaman. Kapabilitas ofensif militer suatu negara berkaitan dengan kemampuannya untuk memobilisasi kekuatannya secara cepat dan efisien (Nokkala, 1991). Kemampuan tersebut penting terutama saat masa-masa awal konflik. Desch (1992) juga menjelaskan bahwa pangkalan militer di lokasi yang strategis memiliki kemampuan sebagai pengganda kekuatan. Kekuatan militer suatu negara akan lebih besar bila jarak pangkalan militer dengan operasi militer lebih dekat.

Kekuatan ofensif Diego Garcia didukung oleh lokasi geografisnya yang dekat dengan sumber konflik. Posisi Diego Garcia

efektif untuk aksi militer di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan (Evers, 2011). Kedekatan geografis Diego Garcia dengan wilayah tersebut dapat memperpendek waktu yang diperlukan untuk mobilisasi sehingga operasi militer menjadi lebih efisien. Pangkalan militer Diego Garcia digunakan untuk seluruh misi Amerika Serikat di Afganistan dan Irak sebagai dermaga angkatan laut dan lokasi pesawat pengebom (Edis, 2004; Sand, 2009).

Pasca serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, terorisme menjadi prioritas utama agenda keamanan nasional Inggris (HMSO, 2004). Partisipasi Inggris terhadap kampanye melawan terorisme yang dipimpin Amerika Serikat di Afganistan dan Irak semakin meningkatkan ancaman terhadap Inggris (Bamford, 2004). Direktur Jendral Dinas Keamanan MI5 menyatakan bahwa Osama Bin Laden secara khusus menyebut Inggris memiliki potensi sebagai target (Manningham-Buller, 2003). Respon Inggris secara militer adalah mendukung Amerika Serikat sebagai sekutu dalam perang melawan terorisme. Diego Garcia menunjukkan fungsinya sebagai pangkalan militer milik Inggris dan Amerika Serikat dalam operasi-operasi militer tersebut.

Diego Garcia merupakan pangkalan militer yang berharga bagi Inggris. Bila tujuan pangkalan militer dibangun adalah untuk tempat latihan, maka populasi manusia yang rendah, ketersediaan ruang, dan infrastuktur untuk komunikasi menjadi syarat yang kritikal. Sedangkan, bila tujuan pangkalan militer adalah untuk intervensi militer, maka kemampuan untuk merespon ancaman secara cepat dan

efektif menjadi hal yang penting (Adam, 2017). Diego Garcia memenuhi kedua kriteria tersebut karena memiliki jumlah populasi yang rendah, ruang yang luas, infrastruktur komunikasi, kelengkapan fasilitas, dan posisi geografis yang strategis. Oleh karena itu, Pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mempertahankan efektivitas pangkalan militer tersebut

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan menetapkan konservasi lingkungan di sekitar pangkalan militer merupakan salah satu cara pemerintah memanfaatkan isu lingkungan untuk mempertahankan kepentingan keamanannya. Konservasi alam dapat menjustifikasikan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingannya di pangkalan militer, meskipun dapat merugikan kepentingan masyarakat asli wilayah tersebut. Konservasi yang secara penuh melarang ekstraksi sumber daya alam dapat merugikan Chagossian karena menghalangi pemenuhan kebutuhan ekonomi bila mereka menetap kembali di Kepulauan Chagos. Pemerintah Inggris diuntungkan karena bila Chagossian tidak memiliki cara untuk memenuhi perekonomiannya, maka kemungkinan mereka menetap secara permanen di Kepulauan Chagos akan semakin kecil. Keterasingan dan kerahasiaan pangkalan militer Diego Garcia tetap terlindungi karena kebijakan Pemerintah Inggris berupa penetapan konservasi di sekitar wilayah tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, N. M. (2017). Berbera basing politics: understanding actors, interests, and animosities. *African Journal of Political Science and International Relations*, 11(7), 182-192
- Agnew, W. G. (1965). The British Indian Ocean Territory Order 1965. S. I. No. 1 of 1965
- Archer-Rand, S., Hardman, E., Collins, M., & Deary, A. (2018). *Blue Belt Overseas Territory Work Plan: British Indian Ocean Territory*. UK Government
- Bandjunis, V. B. (2001). *Diego Garcia: Creation of the Indian Ocean Base*. San Jose, CA: Writer's Showcase
- Bangaroo, S. (2005). A short analysis of the exile of an indigenous population from beginning to end. *Hertfordshire Law Journal*, 3(1), 3-7
- Bamford, B. (2004). The United Kingdom's "War Against Terrorism". *Terrorism and Political Violence*, 16(4), 737-756
- Bezboruah, M. (1977). *US Strategy in the Indian Ocean: The International Response*. New York: Praeger Publishers
- Bruce, D. (1967). Exchange of notes constituting an agreement concerning the availability for defense purposes of the British Indian Ocean Territory (with annexes). United Nations – Treaty Series No. 8737
- Colson, D. A. & Vohrer, B. J. (2015). In re Chagos Marine Protected Area (Mauritius v. United Kingdom). *The American Journal of International Law*, 109(4), 845-851
- Desch, M. C. (1992). Bases for the Future: U.S. Military Interests in the Post-Cold War Third World. *Security Studies*, 2:2, 201-224, DOI: 10.1080/09636419209347509
- Dudley, M. (2012). *Castlemartin*, in *An Environmental History of the UK Defense Estate 1945 to the Present*. London: Continuum International Publishing Group
- Durup, J. (2013). The Chagos, A short history and its legal identity. *Etudes Ocean Indien*, 49-50
- ECHR. (2012). *Chagos Islander against the United Kingdom, Fourth Section Decision*. European Court of Human Rights
- ECHR. (2014). *The ECHR in 50 Questions*. https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf
- Edis, R. (2004). *Peak of Limuria: the story of Diego Garcia and the Chagos Archipelago*. London: Chagos Conservation Trust. London: Chagos Conservation Trust
- Erickson, A. S., Ladwig, W. C., & Mikolay, J. D. (2010). Diego Garcia and the United States' emerging Indian Ocean strategy. *Asian Security*, 6: 214–37
- Evers, S. J.T.M. & Kooy, M. (2011). *In Eviction from the Chagos Islands: Displacement and Struggle for Identity Against Two World Powers*. Leiden: Brill
- FCO. (2009). *FCO Consultation Document: Consultation on Whether to Establish a Marine Protected Area in the British Indian Ocean Territory*. Foreign and Commonwealth Office, London. Retrieved from www.fco.gov.uk
- Gifford, R. & Dunne, R. P. (2014). A dispossessed people: the depopulation of the Chagos Archipelago 1965-1973. *Population, Space and Place*, 20, 37-49
- Gomez, E. M. V. & Cinelli, C. (Ed.). (2014). *Regional Strategies to Maritime Security: A Comparative Perspective*. Valencia: COST Action
- HMSO. (2004). *The Scientific Response to Terrorism*. Norwich
- Jeffery, L. (2013). 'We are the true guardians of the environment': human-environment relations and debates about the future of the Chagos Archipelago. *Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.)*, 19, 300-318
- Lunn, J. & Mills, C. (2013). *Disputes over the British Indian Ocean Territory: A Survey*. House of Commons Library Research Paper
- Manningham-Buller, "Countering Terrorism: An International Blueprint," Speech given at the RUSI conference (17 June 2003) <https://www.mi5.gov.uk/cy/node/409> [4/10/2019]
- Marine Protected Area News. (2010). *UK Designates MPA around Chagos Archipelago but No Decision Yet on How Much Will Be No-Take*
- Mees, C., Pearce, J., Clarke, J., & Wilson, O. (2009a). UK (Chagos/BIOT) national report. IOTC Twelfth Session of the Scientific Committee Mahé, Seychelles

- Nokkala, A. (1991). *Non-Offensive Defence: A Criteria Model of Military Credibility*. Finland: War College
- Palmer, M. A. (1992). *Guardians of the Gulf: A History of America's Expanding Role in the Persian Gulf, 1833–1992*. New York: The Free Press
- Sand, P. H. (2009). *United States and Britain in Diego Garcia: The Future of a Controversial Base*. New York: Palgrave Macmillan
- Sand, P. H. (2010). The Chagos Archipelago: footprint of Empire, or world heritage. *Environmental Policy and Law*, 4(5), 232-241
- Vine, D. (2009). *Island of Shame: The Secret History of the U.S. Military Base on Diego Garcia*. United Kingdom: Princeton University Press
- Galloway (2004)